

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Ismiyati

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

Skripsi yang berjudul “**Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) Pelaksanaan dan Hambatannya; Kasus Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta 1960 – 1966**” ini beranjak dari 3 permasalahan. Pertama, sejarah situasi pembagian hasil secara umum di Indonesia sebelum terbentuknya Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil. Kedua, sejarah situasi pembagian hasil secara khusus di Yogyakarta sebelum lahir Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil. Ketiga, mengapa Pelaksanaan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil tidak dapat dilaksanakan dan apa hambatannya. Untuk membahas permasalahan itu akan mendekatinya dengan teori ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif-analistis yang didasarkan pada sumber berupa buku-buku dan hasil wawancara dengan para narasumber pemilik tanah dan petani penggarap di Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta 1960 – 1966.

Penulisan sejarah Agraria, yang berkaitan dengan tanah dan hasilnya merupakan masalah yang sangat menarik untuk diangkat. Karena sangat sesuai dengan situasi kehidupan masyarakat agraris di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani dan sebagian besar dari para petani itu adalah para petani penggarap. Dengan demikian sangat banyak para petani penggarap yang menggantungkan diri dengan pembagian hasil dengan para pemilik tanah. Kondisi seperti ini menimbulkan ketimpangan, baik secara ekonomi maupun sosial. Atas dasar itulah maka dicapai pembentukan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil No. 2/1960 yang salah satunya mengatur persentase pembagian hasil yang layak antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Secara garis besar hasil dari penelitian ini menyampaikan tentang suatu usaha untuk melaksanakan produk hukum yang bertujuan meminimalisir ketimpangan atas pembagian hasil produksi tanah antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Selain itu juga dibahas apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan UUPBH. Terlepas dari itu, pelajaran yang dapat diambil ialah gagasan untuk kembali melihat tujuan dari UUPBH agar dapat dilihat kemungkinan untuk kembali dengan konsisten melaksanakan isi dari UUPBH untuk mengurangi ketimpangan antara pemilik tanah dengan para petani penggarap.

Kata Kunci: Sejarah Agraria, Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Ismiyati

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

This thesis, entitled "**The Profit Sharing Agreement Act (UUPBH) Implementation and Obstacles; Case-study of Sumbermulyo Village, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta from 1960 to 1966**" departs from 3 central problems. In a first step it looks at the general history regarding the situation of Profit Sharing in Indonesia before the formation of the Law of Profit Sharing Agreement. Secondly, the thesis focuses on the particular history regarding the situation of Profit Sharing in Yogyakarta before the genesis of Law Production Sharing Agreement. Finally it addresses the questions of why the "The Profit Sharing Agreement Act (UUPBH)" cannot realistically be implemented and what the obstacles are. To address these issues the author takes an approach based on the populist economic theory of Muhammad Hatta. The methodology used in this paper is descriptive-analytical; relying on bibliographic sources/references as well as interviews with landowners and tenant farmers in the village of Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta specifically as to the period between 1960 and 1966.

Agrarian history writing, relating to land and land use productivity, is an extremely exciting discipline to be pursued. This is evidently so since it is very appropriate to the situation of agrarian society in Indonesia. In Indonesia most of the citizens are farmers yet most of the farmers are landless. This causes a situation whereby a majority of tenant farmers rely on the shared profits with landowners. Such conditions very often lead to inequality, both economically and socially. As a result, a law was established in 1960, "The Profit Sharing Agreement Act (UUPBH) Nr. 2/1960", which amongst others attempts to regulate a decent percentage of revenue-sharing between owners of land and tenants.

Broadly speaking, the results of this research address an attempt to implement those very laws that were aimed at minimizing the inequality over land profit-sharing between landowners with tenants. It moreover reveals the bottlenecks in the implementation of UUPBH. Aside from this, lessons can be taken through the notion over thinking the purpose of UUPBH to be viewed instead as a possibility to return to consistently implement the contents of UUPBH in order to reduce inequality between landowners with tenant farmers.

Key words: Agrarian History, Profit Sharing Agreement Act